

LAPORAN PROGRAM RISET PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENDAMPINGAN WARGA DESA CANGKUANG WETAN
DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM AGRARIA UNTUK
MENINGKATKAN NILAI EKONOMI TANAH DESA CANGKUANG WETAN
KECAMATAN DAYEUKOLOK KABUPATEN BANDUNG**

Ketua:

Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H. (NIDN: 0404037003)

Anggota:

Dr. Subelo Wiyono, S.H., M.Pd. (NIDN: 0419037204)

H. Yudi Prihartanto Soleh, S.H., M.Hum. (NIDN: 0406067103)

Rusli Subrata, S.H., M.H. (NIDN: 0430077202)

Kristina Natasha

Nindi Nadya Pasha

Pemberi Dana: Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Nomor kontrak:

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM RISET PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Riset : **PENDAMPINGAN WARGA DESA CANGKUANG WETAN
DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM AGRARIA
UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMI TANAH
DESA CANGKUANG WETAN KECAMATAN DAYEUEHKOLOT
KABUPATEN BANDUNG**

Ketua Periset

a. Nama Lengkap : Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.
b. NIDN/NIPY : 0404037003/15110808
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 08122356900
Alamat surel (e-mail) : saimaksinudin@unpas.ac.id

Anggota Periset (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Subelo Wiyono, S.H., M.Pd.
b. NIDN/NIPY : 0419037204/15110623
c. Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Periset (2)

a. Nama Lengkap : H. Yudi Prihartanto Soleh, S.H., M.Hum.
b. NIDN/NIPY : 0406067103/15110606
c. Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Periset (3)

a. Nama Lengkap : Rusli Subrata, S.H., M.H.
b. NIDN/NIPY : 0430077202/15110958

- c. Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
- d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Mahasiswa (1)

- a. Nama Lengkap : Kristina Natasha
- b. NIM : 181000286
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Semester : 7

Anggota Mahasiswa (2)

- a. Nama Lengkap : Nindi Nadya Pasha
- b. NIM : 181000304
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Semester : 7

Anggaran : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bandung, 17 Pebruari 2023

Mengetahui,
Dekan,

Ketua Periset,

Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum.
NIDN/NIPY:

Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.
NIDN: 0404037003

Menyetujui,
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat,

Dr. Ir. Asep Dedy Sutrisno, MP.
NIDN/NIPY:

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat:

**PENDAMPINGAN WARGA DESA CANGKUANG WETAN
DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM AGRARIA UNTUK
MENINGKATKAN NILAI EKONOMI TANAH DESA CANGKUANG WETAN
KECAMATAN DAYEUKHKOLOT KABUPATEN BANDUNG**

2. Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi waktu jam/minggu
1.	Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Agraria	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Sesuai kebutuhan di lapangan
2.	Dr. Subelo Wiyono, S.H., M.Pd.	Anggota	Filsafat Hukum	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Sesuai kebutuhan di lapangan
3.	H. Yudi Prihartanto Soleh, S.H., M.Hum.	Anggota	Hukum Acara	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Sesuai kebutuhan di lapangan
4.	Rusli Subrata, S.H., M.H.	Anggota	Hukum Acara	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Sesuai kebutuhan di lapangan
5.	Kristina Natasha	Anggota	Mahasiswa	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Sesuai kebutuhan di lapangan
6.	Nindi Nadya Pasha	Anggota	Mahasiswa	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Sesuai kebutuhan di lapangan

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat:

Objek Pengabdian kepada Masyarakat dalam kegiatan ini adalah Desa Cangkuang Wetan Kecamatan: Dayeuhkolot Kabupaten; Bandung. Desa akan dibantu untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam bidang agraria sesuai dengan program pemerintah.

4. Masa Pelaksanaan:
Mulai: Maret 2022
Berakhir: Agustus 2022
5. Biaya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan: Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Mitra yang terlibat: perangkat desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
7. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: Banyak masyarakat desa yang belum memahami pentingnya sertifikat tanah. Masyarakat akan dibantu dengan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan agar mendapatkan manfaat secara hukum dan ekonomi.
8. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran:
Hadirnya pakar hukum dan mahasiswa akan membuat masyarakat merasakan adanya kontribusi akademik dalam lapangan nyata. Kesadaran hukum dalam bidang agraria akan meningkatkan nilai ekonomi tanah yang dimiliki masyarakat. Peran perangkat desa dalam kegiatan ini akan menumbuhkan harmonisasi kehidupan di desa yang didasarkan kepada kesadaran hukum.
9. Rencana luaran yang ditargetkan: Jurnal sinta 3.

Rencana Anggaran dan Biaya

No	Rincian Jenis Pekerjaan	Jumlah	
1	Honorarium		
	A. Sosialisasi		
	1.1.1 Pembawa Acara	Rp	400.000
	1.1.2 Moderator	Rp	700.000
	1.1.3 Nara Sumber	Rp	900.000
	B. FGD		
	1.2.1 Fasilitator 1	Rp	900.000
	1.2.2 Fasilitator 2	Rp	900.000
	1.2.3 Fasilitator 3	Rp	900.000
2	Konsumsi		
	1.1.1 Sosialisasi (100 x Rp 5.000)	Rp	500.000
	1.2.2 FGD 1 (12 x Rp 5.000)	Rp	60.000
	1.2.3 FGD 2 (12 x Rp 5.000)	Rp	60.000
	1.2.4 FGD 3 (12 x Rp 5.000)	Rp	60.000
		Rp	5.320.000
	Dana dari Fakultas: Rp 5.000.000,00		
	Dana dari mitra: Rp 320.000,00		

DAFTAR ISI

LAPORAN PROGRAM RISET PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
DAFTAR ISI.....	7
RINGKASAN/ <i>ABSTRACT</i>	8
PENDAHULUAN	9
SOLUSI DAN TARGET LUARAN	11
METODE PELAKSANAAN	15
JADWAL (tahun 2022).....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18

RINGKASAN/ABSTRACT

Pemerintah melakukan program-program untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan banyaknya tanah di Indonesia belum bersertifikat. Sertifikat tanah diperlukan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum berupa bukti otentik atas kepemilikan tanah tersebut. Program yang dilaksanakan pemerintah secara serentak meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan pemberian tanda bukti untuk bidang tanah yang sudah ada hak di atasnya. Hak tersebut bisa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak guna pakai. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan mampu menyentuh segenap lapisan masyarakat dengan terpenuhinya harapan tercapainya kepastian hukum. PTSL juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya dalam suatu wilayah kelurahan/desa mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlayani oleh PTSL.

Pengabdian ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan hal-hal yang bisa mempercepat program yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan PTSL. Para mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang terlibat dalam pengabdian ini akan mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan masyarakat sekaligus memberikan manfaat dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dengan dosen pembimbing. Para dosen akan mendapatkan manfaat mengetahui langsung situasi di lapangan dan memberikan berbagai pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat serta mendapatkan data yang sangat berguna untuk pengembangan keilmuan.

Kegiatan yang dilaksanakan ini akan didesain dalam rangkaian kegiatan pengabdian sehingga semua pihak yang terlibat akan masuk di dalam kegiatan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Desain yang dibuat akan memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan peningkatan kapasitas, seminar, pelatihan dan kegiatan lain yang sejenis dengan memperhatikan perkembangan terbaru dalam lapangan pengabdian. Hal tersebut akan membuat secara menyeluruh kegiatan ini menghasilkan luaran yang bisa dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan juga akan memberikan data-data dalam mendukung pengembangan rancangan/model program pembelajaran berbasis program MBKM.

Kata kunci: PTSL, Hukum Agraria, Merdeka Belajar.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanah kepada negara agar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat adalah salah satu bentuk pelaksanaan amanah tersebut. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perbuatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang.

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh kepada berbagai sektor kehidupan. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi salah satu langkah penting yang perlu terus dilakukan secara intensif setelah pandemi COVID-19 melanda berbagai belahan dunia. Peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu upaya membuat masyarakat tangguh menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Salah satu strategi yang bisa dilakukan terkait hal tersebut adalah dengan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan menerjunkan mahasiswa ke masyarakat.

MBKM memberikan peluang kepada mahasiswa untuk praktik di lapangan, eksplorasi pengetahuan dan kemampuan, belajar memperluas jaringan, dan menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas. Para dosen dan berbagai pemangku kepentingan yang lain bisa berkolaborasi membangun desa dengan MBKM. Pandemi COVID-19 akan menjadi situasi dan kondisi yang dihadapi bersama dan dengan adaptasi kebiasaan baru akan menjadi medan tempur sekaligus tempat belajar yang baik untuk mengembangkan keuletan dan ketangguhan masyarakat. Para pemangku kepentingan yang terlibat bisa berbagi sekaligus bersama-sama menciptakan suasana baru yang lebih tangguh dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang pernah diterapkan hingga saat ini membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat yang membutuhkan penguatan potensi secara ekonomi. Sinergi yang terjadi akan membuat situasi kondusif yang membuka peluang besar terlaksananya berbagai program untuk mencapai kemajuan bersama. Hadirnya dosen dan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat dengan filosofi MBKM akan makin

memperkokoh berbagai program pemberdayaan masyarakat sekaligus memberikan masukan positif bagi kampus dengan hasil penelitian yang nyata bermanfaat di lapangan (Faedlulloh, 2016).

Tujuan pengabdian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktik di lapangan, eksplorasi pengetahuan dan kemampuan, belajar memperluas jaringan, dan menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas.
2. Memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan kepada masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini sehingga bersama-sama lebih tangguh menghadapi pandemi COVID-19.
3. Melakukan kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya terutama berkaitan dengan PTSL dengan memperhatikan kondisi lapangan yang terbaru.
4. Meningkatkan kesadaran hukum agraria sehingga bisa mendukung suksesnya PTSL.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan data langsung di lapangan sehingga pembelajaran di kampus bisa lebih berkualitas dengan indikator makin bagusnya desain pembelajaran dengan dukungan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengikuti kebutuhan di lapangan dan peningkatan kualitas perangkat pembelajaran lainnya.
2. Luaran penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lingkungan kampus pada khususnya. Publikasi hasil penelitian ini akan diupayakan pada jurnal internasional atau setidaknya jurnal nasional sinta 4.

Desain penelitian yang sedemikian rupa ini akan menjadikan urgensi penelitian ini sebagai bagian dari program MBKM sekaligus sinergisitas penanganan pandemi COVID-19 dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui naiknya potensi ekonomi dalam bidang agraria.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi tantangan pada situasi dunia saat ini yang masih belum bebas dari pandemi COVID-19. Kesadaran hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan berbagai program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada ranah ini pemberdayaan ekonomi menjadi bagian sinergi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus membangun struktur hukum yang kokoh bagi masa depan bangsa. Hal demikian tentu akan melahirkan berbagai tantangan yang akan terus muncul dan menjadi tugas semua pemangku kepentingan yang terkait untuk menyelesaikannya. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi akan berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan bangsa yang berkesinambungan (Mansur, 2018).

Pemerintah menghadapi tantangan untuk mendorong penguatan ekonomi dalam konteks COVID-19 dan pembangunan hukum. Problem ini memang tidak mudah akan tetapi dengan harmonisasi yang dilakukan semua pemangku kepentingan yang terkait maka berbagai kendala akan bisa dihadapi dengan langkah-langkah terukur. Berbagai negara di dunia bisa dianalisis bagaimana kesulitan yang terjadi akibat pandemi tersebut. Kekuatan fundamental ekonomi dan determinasi bagaimana menggerakkan ekonomi akan menjadi faktor penting menghadapi situasi yang begitu dinamis saat ini. Peran serta kampus dalam meningkatkan literasi khususnya di bidang hukum akan memberikan pengaruh penting bagaimana pemberdayaan ekonomi akan terus bisa dilakukan. Hal demikian akan ditunjang dengan hadirnya peneliti-peneliti dari kampus yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama memecahkan berbagai persoalan yang muncul (Dodds et al., 2020).

Peningkatan potensi ekonomi masyarakat menjadi bagian dari cita-cita pendiri bangsa untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah memiliki komitmen untuk membangun ekonomi masyarakat dengan mewujudkan kesejahteraan khususnya bagi kelompok

masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Herdiana, 2019). Hal demikian akan memiliki relasi dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Manusia dalam hukum adat terutama adalah sebagai anggota masyarakat. Hukum adat memandang kehidupan individu sebagai kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdikan kepada masyarakat. Tanah adat sebagai hak kepemilikan bersama dari suatu masyarakat hukum adat dipandang sebagai tanah bersama yang merupakan “pemberian/anugerah”, sehingga hak perorangan bersumber dari tanah bersama tersebut. Oleh karena itu, masyarakat akan mengembangkan sejumlah norma-norma tertentu tentang tanah baik yang dikuasai secara komunal maupun secara perorangan. Pembangunan ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan filosofi tersebut akan efektif memajukan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Komariah et al., 2018).

Pandemi COVID-19 telah merubah perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut dibuktikan adanya pengalihan-pengalihan anggaran dalam rangka penanganan pandemi ini. Antisipasi dampak yang sangat luar biasa di seluruh dunia dan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang ada di Indonesia dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional sekaligus pemerataan keadilan sosial. Masyarakat yang terpengaruh terutama dalam bidang ekonomi yang selama ini banyak sudah mulai membaik sebelum terjadi pandemi COVID-19. Pembangunan kesadaran hukum akan menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat pasca pandemi (Sarip et al., 2020). Kesadaran hukum yang dimaksud di sini adalah termasuk kesadaran akan kepemilikan tanah.

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat, bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa di antara sesamanya, terutama yang menyangkut

tanah. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Tanah telah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu negara, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non* (Wijaya, 2013).

Penanggulangan pandemi COVID-19 berbasis kepada pemberdayaan masyarakat membuka peluang akademisi ilmu hukum untuk melakukan penelitian sekaligus melakukan pendidikan hukum bagi masyarakat dengan melibatkan mahasiswa yang pada masa depan akan menjadi generasi penerus penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Keterlibatan masyarakat desa merupakan bagian dari advokasi masyarakat sipil untuk membangun masa depan demokrasi yang lebih baik (Flanagan et al., 2007). Program Kampus Merdeka Belajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan proyek di desa dengan bimbingan para dosen sehingga mendukung pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mendidik mahasiswa membangun habitus bagi dirinya sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang.



Gambar 1. Posisi penelitian pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari MBKM.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut maka solusi dan target luaran akan tergambar sebagai berikut:



bimbingan teknis

pendaftaran tanah



pendampingan

solusi persoalan yang ada

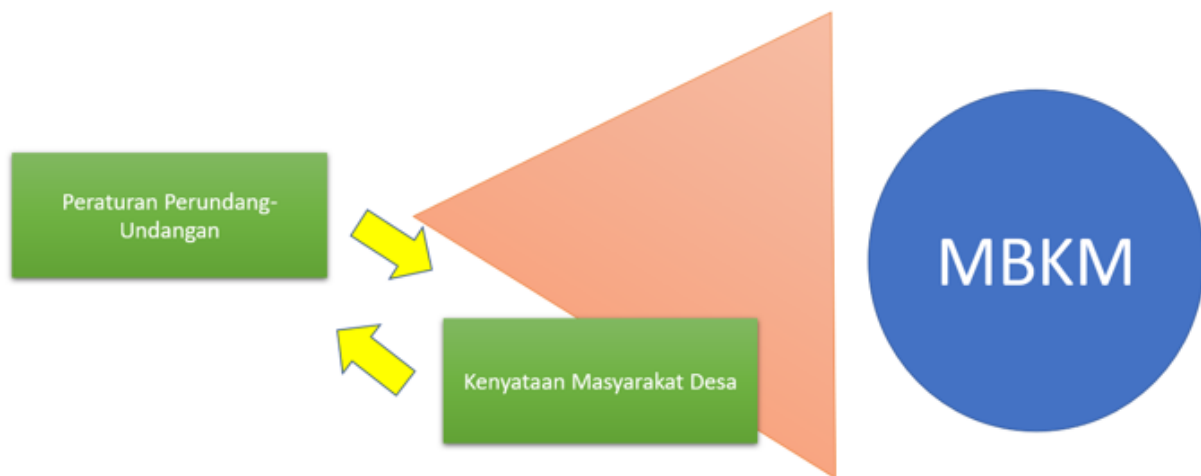


target

peningkatan kesadaran hukum, peningkatan nilai ekonomi tanah

METODE PELAKSANAAN

Metode dalam pengabdian ini adalah membuat satu sinergi baik tim dosen, mahasiswa dengan masyarakat di tempat pengabdian kepada masyarakat dilakukan sehingga diharapkan bisa menghasilkan manfaat nyata dengan pendekatan yang dinamis sesuai perkembangan di lapangan. Berdasarkan perkembangan yang ada di lapangan tersebut maka kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan senantiasa dikaji secara mendalam. Hal tersebut akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kenyataan sosial yang ada. Terciptanya harmonisasi senantiasa diupayakan sehingga pengabdian kepada masyarakat pada masa pandemi bersinergi dengan Program MBKM. Lokasi penelitian yang unik memungkinkan peneliti melakukan triangulasi pada beberapa titik yang diasumsikan sebagai populasi-populasi. Mahasiswa yang diterjunkan dengan bimbingan dosen akan mendapatkan keterampilan tambahan berargumentasi, mengambil keputusan, serta pengkongkretan (menerapkan aturan hukum pada kasus konkret) sehingga akan menjadi satu sinergi yang optimal (Susanto, 2011).



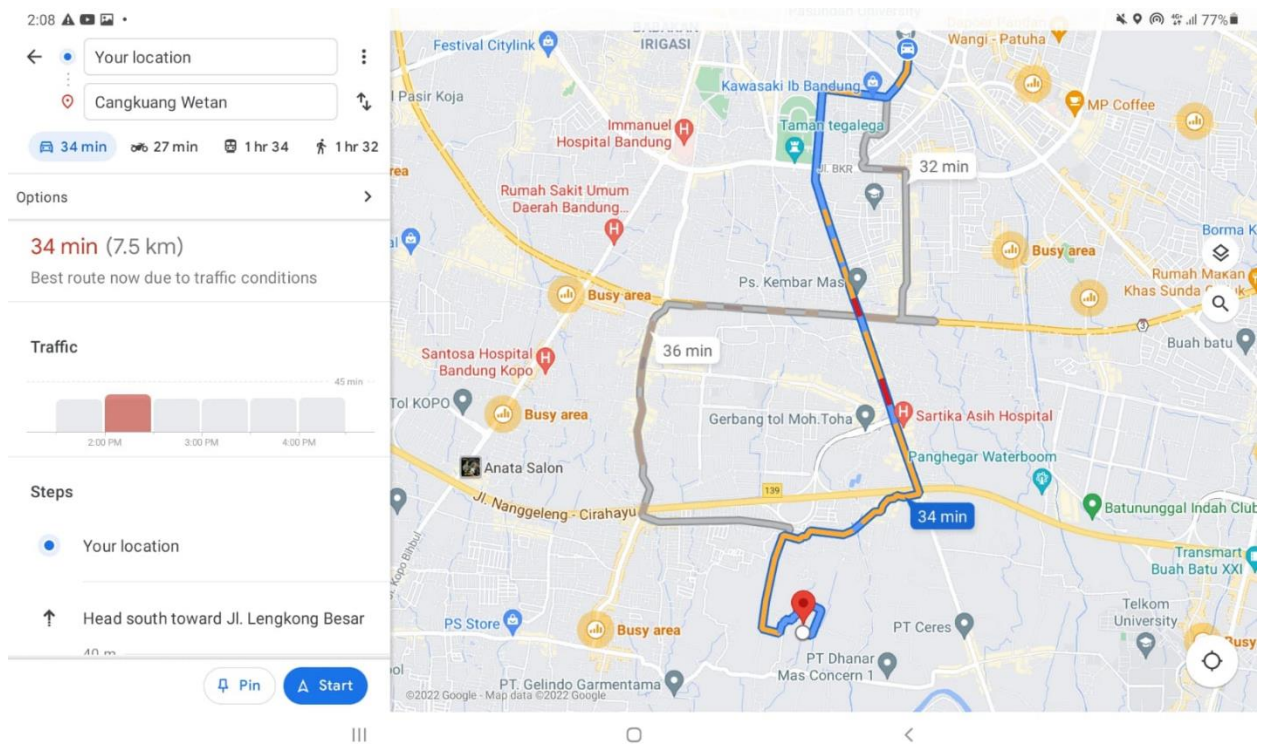
Gambar 2. Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam konteks MBKM.

Ketua bertugas sebagai koordinator di seluruh tahapan penelitian, penentuan metode analisis dan pengolahan data serta verifikasi hasil, sedangkan anggota peneliti bertugas dalam membimbing mahasiswa terjun di desa tempat penelitian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pengambilan data bersama para mahasiswa.

Para anggota akan berbagi tugas sesuai kepakaran masing-masing dengan dibantu mahasiswa yang terlibat untuk mengembangkan dinamika pengabdian sehingga mencapai target yang diharapkan.

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Desa Canguang Wetan yang merupakan tempat yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan tim peneliti untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan penelitian. Kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan beberapa mata kuliah dalam konteks kebutuhan pemahaman hukum oleh masyarakat dan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester.

Tahapan pengabdian akan dirancang secara umum untuk kemudian disesuaikan dengan realitas yang ada di lapangan pada saat pengabdian mulai dilaksanakan. Tim akan dengan sungguh-sungguh mencermati keadaan lapangan untuk kemudian melakukan langkah-langkah sesuai dengan tujuan pengabdian masyarakat dilaksanakan. Hal demikian tentu dengan memperhatikan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekaligus melakukan langkah-langkah manajerial untuk mengelola segenap potensi sehingga keberhasilan yang akan dicapai menjadi optimal.



Gambar 3. Peta lokasi tempat penelitian.

JADWAL (tahun 2022)

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		3	4	5	6	7	8
1	Persiapan: perijinan, penyediaan alat dan bahan kegiatan penelitian	√					

2	Sosialisasi penelitian kepada pemangku kepentingan di lokasi tempat penelitian	√					
3	Pengambilan data (permasalahan hukum yang paling penting untuk segera mendapatkan perhatian)		√				
4	Solusi tim peneliti untuk masyarakat desa		√	√	√		
7	Pelaporan dan Publikasi				√	√	√

DAFTAR PUSTAKA

1. Dodds, K., Broto, V. C., Detterbeck, K., Jones, M., Mamadouh, V., Ramutsindela, M., Varsanyi, M., Wachsmuth, D., & Woon, C. Y. (2020). The COVID-19 pandemic: territorial, political and governance dimensions of the crisis. *Territory, Politics, Governance*, 8(3), 289–298. <https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1771022>.
2. Faedlulloh, D. (2016). Membangun Demokrasi Ekonomi: Studi Potensi Koperasi Multi-Stakeholders Dalam Tata Kelola Agraria Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 65–76. <http://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/356/462>
3. Flanagan, C., Levine, P., & Settersten, R. (2007). Civic Engagement and the Transition to Adulthood. *The Future of Children*, 20(1), 159–179. <https://www.jstor.org/stable/27795064>.
4. Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>.
5. Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>.
6. Mansur. (2018). BANK SYARIAH: Antara Labelisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 54–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3547>.
7. Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>.
8. Susanto, A. F. (2011). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (1 ed.). LoGoz Publishing.
9. Wijaya, K. (2013). Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia. *Unsrat Manado*, 1(5), 44–45.

Implementasi Nilai Kebangsaan sebagai Dasar Pendidikan Hukum untuk Anak Usia Dini

Subelo Wiyono¹, Saim Aksinudin², Yudi Prihartanto³, Rusli Subrata⁴

^{1, 2, 3, 4} Fakultas Hukum Universitas Pasundan

DOI : <https://doi.org/10.15642/jeced.v4i2.2236>

Abstract

The development of quality Indonesian human resources is strongly influenced by the success of early childhood education. Problems in the field of law today require solving strategies from various fields. Early childhood education is a very important field in participating in solving legal problems in Indonesia. This writing provides an overview of how early childhood education plays a role in building the world of law in the future. The writing method used is literature study supported by various kinds of discussions in the form of focus group discussions and national seminars. The philosophy of Pancasila which continues to be studied and practiced by teachers in the early childhood environment will foster awareness of a quality nation that can be proud of in the global arena. This is because education does not only develop the potential of senses and logic for all involved in it but also develops the potential of conscience, instinct, intuition and imagination.

Abstrak

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia berkualitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pendidikan anak usia dini. Problematika di bidang hukum saat ini membutuhkan strategi pemecahan dari berbagai bidang. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam ikut serta menyelesaikan problematika hukum di Indonesia. Penulisan ini memberikan gambaran bagaimana pendidikan anak usia dini ikut berperan dalam membangun dunia hukum di waktu yang akan datang. Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur yang ditunjang oleh berbagai macam diskusi dalam bentuk *focus group discussion* maupun seminar nasional. Filsafat Pancasila yang terus dikaji dan diamalkan oleh para guru di lingkungan anak usia dini akan menumbuhkan kesadaran berbangsa yang berkualitas dan dapat dibanggakan di percaturan global. Hal demikian mengingat pendidikan tidak hanya mengembangkan potensi indera dan logika bagi semua yang terlibat di dalamnya akan tetapi juga mengembangkan potensi nurani, naluri, intuisi, dan imajinasi.

Article Info

Article history:

Received: November 10, 2022

Approved: December 21, 2022

Published online: December 31, 2022

Keywords:

*national values,
Pancasila,
education,*



Informasi Artikel

Riwayat Artikel

Diterima: 10 November 2022

Disetujui: 21 Desember 2022

Publikasi online: 31 Desember 2022

Kata kunci:

*Nilai kebangsaan,
Pancasila,
pendidikan,*



PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia memberikan banyak kemajuan khususnya di bidang pendidikan. Kontribusi tidak hanya diberikan oleh para praktisi pendidikan tetapi juga oleh segenap komponen bangsa Indonesia dengan kesadaran luhur mempersiapkan generasi yang lebih tangguh untuk melanjutkan cita-cita proklamasi 1945. Adanya konsensus para pemimpin bangsa yang menjadikan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesadaran bersama akan memperkokoh jati diri bangsa menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi masyarakat dunia.

Pendidikan anak usia dini perlu mendapat perhatian serius dalam membangun generasi tangguh di masa yang akan datang. Implementasi nilai kebangsaan bersumber dari empat konsensus dasar bangsa pada pendidikan anak usia dini tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Orang tua dan guru menjadi faktor penting bagaimana nilai-nilai luhur yang sudah menjadi konsensus tersebut secara proporsional diwariskan kepada anak-anak yang akan melanjutkan idealisme yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang sudah hidup dan tumbuh subur di tanah air Indonesia sebelum Proklamasi 1945 dikumandangkan. Ketuhanan yang dianut bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang menjadikan setiap warga negara bertuhan dengan keyakinan di dalam dirinya. Hal itu sekaligus dimanifestasikan dengan sikap toleransi yang menjadikan bangsa Indonesia kokoh dalam sepanjang sejarah perkembangannya. Reformasi melahirkan konsensus bahwa nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila itu adalah religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan (Sutarto, 2019). Pengembangan kesadaran akan nilai-nilai tersebut bagi orang tua dan guru akan mempengaruhi bagaimana kesadaran anak-anak pada usia dini akan terbangun menjadi kesadaran kokoh berdasarkan nilai-nilai luhur pada saat mereka sudah harus menerima tongkat estafet dari generasi sebelumnya pada segala bidang.

UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai-nilai demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum (Suherman & Nugraha, 2019). Pembangunan demokrasi bagi bangsa yang jauh lebih muda dibandingkan berbagai negara besar lain di dunia merupakan kebanggaan saat terbukti demokrasi Pancasila membawa Indonesia dengan berbagai dinamika dan tetap tegak berdiri dalam berbagai ujian. Kesadaran akan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sesama manusia yang dijiwai oleh semangat ketuhanan melahirkan persatuan dalam memajukan kesejahteraan umum. Hal demikian akan meningkatkan kompetensi segenap komponen bangsa sehingga ketaatan kepada hukum akan dinikmati bersama membawa pada situasi aman, tertib, dan sejahtera.

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sudah bergaung di tanah air Indonesia selama berabad-abad. Nilai-nilai toleransi, keadilan dan gotong royong adalah kepribadian yang terus-menerus dijaga dan dibuktikan dalam berbagai macam catatan sejarah (Laila & Hulu, 2022). Kejayaan Indonesia membuktikan bagaimana peran nilai-nilai tersebut dalam berkolaborasi membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Nilai kesatuan wilayah dalam kerangka NKRI merupakan realitas yang dikagumi bangsa-bangsa di dunia. Hal demikian merupakan peran dari nilai persatuan bangsa yang terus dijaga dan dipelihara. Kokohnya persatuan yang terus menjadi realitas itu menumbuhkan sikap kemandirian dengan nilai-nilai luhur yang tertanam dalam jati diri bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa sudah melakukan langkah-langkah penting untuk mengikuti Indonesia apalagi jika belajar dari kasus Covid-19 (PITTY, 2022).

Keempat konsensus (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) tersebut merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa bagi segenap anak bangsa yang telah melalui momen reformasi untuk terus melakukan refleksi sehingga kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terus meningkat. Pendidikan yang diselenggarakan di era reformasi akan terus ditingkatkan dengan kesadaran bagaimana konsensus bangsa terus dijaga dan dipelihara sehingga semua pihak yang terlibat di dalamnya akan menjadi manusia-manusia berkualitas dalam kebersamaan ikut

serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Hal tersebut menjadi cita-cita yang ditanamkan kepada generasi penerus untuk menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman.

Guru dan calon guru memerlukan media untuk memantapkan internalisasi nilai-nilai kebangsaan (*nawaitu*) yang bersamaan dengan proses implementasi (*amal*) akan hal tersebut. Gagasan-gagasan pokok dalam Filsafat Pancasila tidak hanya dipahami dalam konteks pengetahuan akan tetapi sekaligus diasah pada dimensi keterampilan pada proses pengembangan budi pekerti luhur. Kegiatan dalam dunia akademik yang di dalamnya ada pengabdian kepada masyarakat menjadi pendukung bagaimana secara masif berbagai pihak akan “bermain” bersama anak-anak bangsa di lingkungan belajar untuk melahirkan generasi cemerlang di masa yang akan datang (Schleicher, 2018).

METODE

Penulisan ini menggunakan metode kajian pustaka mengambil dari 31 sumber dengan perincian 26 sumber (sebagian besar) merupakan kajian/penelitian sejak 2018 sedangkan sisanya karena kelangkaan konten ada yang penulis ambil dari sebelum 2018. Penyusunan tulisan ini juga didukung diskusi dari seminar nasional maupun FGD yang penulis olah menjadi berbagai gagasan dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan serta jawaban yang muncul dalam diskusi yang intensif. Pemikiran reflektif (Yaacob et al., 2021) yang dilakukan selama penelitian berlangsung merupakan kekuatan bagaimana setiap gagasan tidak hanya berhenti pada kesimpulan-kesimpulan di masa lalu tetapi sekaligus intuisi menghadapi problematika di masa yang akan datang. Berbagai macam diskusi yang dilakukan (termasuk pada kesempatan pengabdian kepada masyarakat) didukung kajian pustaka menjadikan tulisan ini tidak hanya kaya gagasan tetapi sekaligus memiliki ruang untuk membandingkan berbagai pemikiran yang sudah dikemukakan dalam berbagai penelitian dan realitas reflektif para pemerhati pendidikan di lingkungan anak usia dini. Pengembangan metode penelitian (Liem, 2018) khas Indonesia (lebih khusus lagi khas Filsafat Pancasila) akan terus berkembang sehingga pendidikan (khususnya di lingkungan anak usia dini) akan menjadi pelopor pendidikan berkualitas di era global dan bukan hanya menjadi pengekor sistem pendidikan yang dianggap maju (barat). Hal demikian tentu dengan mengharapkan terus adanya peningkatan sumber daya manusia yang mendukung pendidikan anak usia dini.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. UUD NRI Tahun 1945 sebelum diamandemen menyatakan dalam pasal 1 ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada amandemen ke-3 kalimat tersebut diubah menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Gagasan demokrasi permusyawaratan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila merupakan usaha sadar dari para pendiri bangsa untuk melakukan apa saja agar demokrasi berjalan dalam konteks keindonesiaan. Soekarno pernah mengemukakan “demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan dari rakyat itu” (Latif, 2021b).

Anak-anak pada usia dini dapat menjalani proses pembelajaran dalam beraneka strategi termasuk dengan kegiatan yang menggerakkan jasmani (aktivitas fisik). Orang tua dan guru dapat berkreasi bagaimana demokrasi digambarkan dengan permainan yang tidak hanya memberikan stimulus pada imajinasi anak-anak tetapi juga membawa anak-anak bergerak mengikuti orang tua dan guru yang secara tidak langsung dapat menanamkan nilai-nilai kesetaraan derajat, kebersamaan dalam pengambilan keputusan, dialog untuk memecahkan berbagai persoalan. Sentuhan demokrasi dengan permainan pada usia dini akan memberikan memori kuat bagi individu sehingga saat dewasa nilai-nilai tersebut sudah ada dalam level naluri yang menjadikan keterampilan *civic* terimplementasikan dalam berbagai aktivitas (Mavilidi et al., 2022).

Demokrasi Pancasila mengalami perkembangan signifikan sejak masa orde lama, orde baru dan orde reformasi. Secara umum konstitusi masih melaksanakan amanah pendiri bangsa bahwa demokrasi Pancasila adalah perwakilan. Semenjak reformasi para tokoh menyepakati bahwa sistem perwakilan (Doherty et al., 2019) tersebut disesuaikan dengan perkembangan di lapangan yang secara teknis membutuhkan penyesuaian. Luasnya negara kita dan kompleksitas persoalan-persoalan di lapangan membuat para pakar hukum ketatanegaraan tidak serta merta memiliki tafsir sama atas makna demokrasi Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dinamika reformasi yang terjadi menunjukkan bahwa sejarah masih mencatat adanya kasus-kasus penyimpangan atas nilai-nilai toleransi, kemanusiaan, cinta sesama anak bangsa, pemilihan umum yang jujur dan adil, serta kesejahteraan sosial bagi semua elemen masyarakat. Pendidikan masih memiliki pekerjaan rumah bagaimana mengembangkan nilai-nilai luhur pada peserta didik pada era digital dengan perkembangan teknologi komputasi yang sangat pesat. Situasi sosial kemasyarakatan masih memunculkan sikap yang mencerminkan politik identitas, menganggap saudara yang sebangsa setanah air sebagai orang lain dengan latar belakang perbedaan keyakinan. Politik yang berkembang masih memungkinkan munculkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)(Hidayati, 2019) untuk mencapai tujuan kekuasaan.

Sikap toleransi pada anak usia dini membutuhkan pola asuh orang tua dan guru. Orang tua dan guru perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi, antara lain agama dan norma sosial. Pengaruh norma sosial dan agama dapat signifikan, jika norma sosial dan agama dapat dikembangkan secara positif. Hal tersebut akan lebih berperan dalam membangun toleransi etnik. Faktor penentu tumbuhnya nilai toleransi pada anak usia dini adalah pendidikan melalui pola asuh dan guru (Wahyuni & Azwar, 2022).

Pancasila tidak dapat diharapkan membentuk kepribadian bangsa yang kokoh jika hanya menjadi pengetahuan yang mati (Ivinson, 2020). *Ruh* (Pring, 2021) dari Pancasila harus bisa ditunjukkan dengan perilaku dan praktek kehidupan yang semakin maju dan beradab karena secara terstruktur, sistematis dan massal praktek hidup berdasarkan nilai-nilai luhur dilaksanakan. Para guru dapat menjadi contoh bagaimana peningkatan kepribadian yang terus menerus pada saat pengetahuan atas filsafat Pancasila bukan sekedar hafalan, ungkapan verbal, tetapi benar-benar menjadi ajaran yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suara-suara yang digemakan oleh kelompok-kelompok yang menyatakan diri mewakili sikap Pancasilais tetapi dengan realitas yang sebaliknya dapat diantisipasi oleh para guru yang matang dalam hidup dengan *ruh* Pancasila.

Nilai demokrasi yang menjadi kesadaran para guru dalam internalisasi pada proses pembelajaran adalah demokrasi Pancasila dengan berlandaskan pada sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila tersebut dijiwai dan

diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipimpin oleh nilai-nilai luhur sehingga mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah yang dilakukan diliputi oleh semangat kekeluargaan dengan hasil musyawarah dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para guru perlu memahami bagaimana saat ini perlu dibukanya kanal-kanal dan ruang-ruang komunikasi politis di dalam masyarakat kita yang sedang melakukan reformasi politik dan hukum dengan memperhitungkan pluralitas orientasi etnis, religious, dan politis (Hardiman, 2019).

Sentimentalis yang mengendap dalam sisi-sisi gelap yang ingin diatasi oleh rasionalitas, seperti: dalam prasangka-prasangka, stigmatisasi, diskriminasi, pengadilan masa, primordialisme, ujaran kebencian, dan sejenisnya (Hardiman, 2018). Hal demikian bisa ditanggulangi dengan terus memetakan tidak hanya perkembangan para anak usia dini akan tetapi lingkungan yang menjadi habitat proses pembelajaran. Strategi pembelajaran yang terus disesuaikan dengan tantangan yang ada akan menekan terjadinya kasus-kasus yang dapat muncul berkenaan dengan hal tersebut.

Kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah antara lain karena masih ada oknum yang tidak menerapkan nilai-nilai kesamaan derajat bisa disikapi dengan baik oleh para guru yang memiliki keterampilan bahkan budi pekerti yang sudah matang karena terasah dalam praktik berkesadaran nilai-nilai luhur warisan para pendiri bangsa. Internalisasi yang dilakukan terus-menerus tidak hanya meningkatkan potensi diri pada dimensi keterampilan tetapi sekaligus pematapan nilai-nilai didasari budi pekerti yang luhur. Pada titik ini persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sesama manusia dibina mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat kemudian dikembangkan pada lingkungan yang lebih luas lagi.

Pada pendidikan anak usia dini para guru juga dapat mendesain satu proses pembelajaran untuk mengembangkan sikap berdasarkan nilai kemandirian. Psikologi peserta didik yang masih didominasi waktu bermain akan menjadi salah satu bagian dari strategi bagaimana kepribadian dikembangkan sesuai usia peserta didik. Secara filosofis para guru dituntut menguasai konsep-konsep dengan mendalam. Pada sisi lain para guru diharapkan melakukan konstruksi dan transformasi sehingga pemahaman filosofis yang dimiliki akan menunjang pengembangan budi pekerti peserta didik (Susilawati et al., 2022).

Perkembangan situasi nasional 10 tahun terakhir menunjukkan ancaman terhadap implementasi nilai-nilai toleransi karena situasi politik dan ulah oknum politisi. Polarisasi masyarakat akibat provokasi membutuhkan ketangguhan dalam penanaman nilai-nilai sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai dinamika yang terjadi hingga saat ini masih dapat ditanggulangi bersama-sama. Pendidikan anak usia dini tidak bisa diabaikan untuk memperhatikan hal demikian (Tryfon et al., 2021) sebagai catatan agar pembekalan anak didik sesuai psikologi yang berkembang di dalam dirinya tertanam nilai-nilai yang sudah menjadi konsensus kebangsaan. Sila ke-1 Pancasila menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi ketuhanan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Agama dijadikan panduan moralitas dan kejuangan politik setelah agama (komunitas) melakukan refleksi dan pbenahan diri. Umat beragama dituntut melakukan transformasi pada dimensi mitos, logos dan etos keagamaan (Latif, 2021b).

Nilai-nilai keadilan yang diwujudkan dalam pembangunan berbagai bidang masih menunjukkan berbagai tantangan khususnya keadilan dalam bidang kesejahteraan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di satu sisi pemerintah terus melaksanakan program yang sudah di buat dan di sisi lain ada pihak-pihak yang masih belum mendukung apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Semua bidang dalam program pembangunan nasional membutuhkan pelaku berkepribadian (Irhas et al., 2022) sekaligus memiliki kompetensi untuk mengabdikan sesuai tugas dan kewajiban yang melekat di dalam dirinya. Pamong untuk anak-anak usia dini memiliki peran penting dalam mempersiapkan pelaku-pelaku tersebut.

Presiden pertama RI pernah menyatakan “Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip *sociale rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, Saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.” Pengembangan persamaan di lapangan ekonomi diharapkan (menurut Soekarno) “tidak ada nada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka”. Hal itu tidak seharusnya dipandang dari kecenderungan utopismenya, tetapi dari segi tekad yang kuat untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan sosial di seberang jembatan emas kemerdekaan (Latif, 2021b).

NKRI yang bersatu, kokoh, berkemajuan, merupakan kebanggaan yang terus menerus diperjuangkan sepanjang perjalanan sejarah. Cita-cita pendiri bangsa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial masih banyak kekurangan di sana sini. Hanya dengan persatuan cita-cita mulia tersebut bisa setingkat demi setingkat akan dicapai. Seringkali ujian menuntut kita mencapai *mushahadah* yang disertai kepasrahan mutlak kepada Allah dengan harapan mengantarkan *salik* menggapai *ma'rifatullah* secara hakiki (Mukaffa, 2018).

Konsensus kebangsaan yang direfleksikan pada NKRI juga mengandung nilai kemandirian. Bung Karno mewariskan nilai-nilai tri sakti yang begitu kuat terkait kemandirian ini. Kemandirian yang dibangun di dalam diri bangsa Indonesia adalah kemandirian dalam segala bidang. Kemandirian itu tentu terkait juga dengan cita-cita ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Menteri Pendidikan saat ini sudah melakukan banyak hal dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Penguatan nilai-nilai luhur yang sekarang sudah menjadi konsensus kebangsaan akan memberikan dukungan bagi segala program dalam memajukan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan anak usia dini yang didukung kesiapan sumber daya guru dengan kekuatan nilai-nilai kearifan lokal kemudian dirumuskan dan dipadukan dengan konsensus para pemimpin di era reformasi akan menguatkan tegaknya Indonesia Emas di 2045.

Otto Iskandardinata adalah nama yang bisa dijadikan contoh dalam proses pembelajaran di kelas. Sejak tahun 1924 dia menjadi guru di *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)*. Dia juga aktif di Budi Utomo, lalu menjadi anggota Dewan Kota (*Gemeenteraad*) Pekalongan. Otto pernah memperjuangkan agar tanah rakyat bisa kembali diperoleh. Dia juga pernah dipindahkan ke Batavia karena kolonial Belanda khawatir semakin meluasnya pengaruh Otto membela rakyat kecil untuk memperoleh keadilan. Semangat ini yang terus menerus perlu diwariskan kepada anak-anak dengan teladan guru sehingga perjuangan demi kejayaan Indonesia menjadi hal yang makin berkualitas (Latif, 2021a).

Pendidikan anak usia dini adalah saat emas bagaimana guru mengemas ketokohan Otto Iskandardinata sehingga pada kondisi tersebut anak-anak mendapatkan kesadaran kuat bagaimana para pendahulu sudah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kompetensi guru dalam mengelola strategi pembelajaran akan menjadi strategi hebat bagaimana membangun generasi tangguh di masa yang akan datang. Kegiatan pelatihan bagi para guru dan penyegaran yang terus menerus dilakukan akan menempatkan kompetensi para guru pada titik optimal yang dibutuhkan kondisi lapangan saat ini. Hal inilah yang menjadikan para guru memiliki bekal untuk pengasuhan anak usia dini (Romero-Tena et al., 2020)

Semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan harus mendukung terwujudnya sekolah yang memberikan akses sama terhadap layanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh bangsa melalui program pendidikan holistik untuk menghasilkan sumber daya yang cerdas dan kompetitif (Rianawaty et al., 2021). Pendidikan budi pekerti di Indonesia berlandaskan kepada nilai-nilai kearifan lokal hasil refleksi para pendahulu yang merupakan warisan yang dikristalkan menjadi ideologi Pancasila. Pertarungan budaya dan peradaban yang terjadi di tataran global tidak hanya akan memperkokoh nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia akan tetapi akan memberikan peran bangsa Indonesia ikut serta berkontribusi bagi kemajuan umat manusia.

Filsafat pendidikan dengan landasan kokoh filsafat Pancasila akan terus berkembang dengan dukungan pemikir-pemikir pendidikan yang tidak hanya sibuk di dimensi wacana tetapi sekaligus pelaku-pelaku pengembangan pendidikan yang akan menjadi model lahirnya manusia-manusia berbudi pekerti luhur. Hal demikian merupakan *sunnatullah* yang hanya dapat dicapai oleh pribadi berhati bersih tanpa sedikit pun noda kebencian akan tetapi dipenuhi oleh rasa cinta. Ajaran luhur peninggalan para ulama yang merupakan pewaris nabi saat ini sudah membumi di atas ladang subur Pancasila. Pupuk dari keringat para pejuang pendidikan akan membuat nilai-nilai luhur terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berbagai kemajuan yang dicapai umat manusia.

Tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pancaran dari keyakinan filsafati, keyakinan historic, keyakinan religius, dan misi suci yang harus menjiwai seluruh pasal-pasal pada batang tubuh. Secara hukum pembukaan bukan bagian konstitusi; ia sekedar berjalan mendahului konstitusi. Hal demikian adalah proses faktual mengenai terjadinya konstitusi, serta keyakinan yang berkaitan dengan cita-cita bangsa, tetapi bukan mempunyai sifat normatif (Latif, 2015). Itulah paham konstitusi dalam arti sempit. Pada paham konstitusi dalam arti luas, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi. Konsekuensi dari hal tersebut prinsip-prinsip non-hukum yang dituangkan dalam pembukaan merupakan apriori-hukum (*rechts apriorie*) yang mendahului sekaligus menjadi hukum positif. Pembukaan sebagai apriori hukum memberi makna hukum sekaligus watak normatif pada ketentuan hukum yang dituangkan dalam bentuk pasal.

Indonesia bukan negara liberal sementara ilmu hukum liberal pada hakikatnya telah menjadi urat nadi pendidikan hukum, dan hampir seluruh pengajaran di fakultas hukum (secara umum) lebih banyak mengajarkan sistem hukum liberal tersebut, sekalipun tidak dapat dikatakan seluruhnya, tetapi sistem hukum liberal masih menjadi fondasi bagi pengembangan pendidikan hukum di Indonesia (Susanto et al., 2020). Pemahaman secara filosofis terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan pendahulu bangsa menjadi penting pada saat guru dituntut memberikan dasar kokoh bagi anak-anak terutama di tingkat usia

dini. Berfilsafat dalam praktek mengajar dengan berbagai strategi agar anak-anak mendapatkan perlakuan secara tepat akan terus meningkatkan kualitas para guru.

Kaelan menyatakan "*Pancasila as the paradigm of science, it contains the truth value*". Agar keyakinan tentang nilai kebenaran yang terkandung dalam Pancasila tetap terjaga kemurniannya, tidak terkontaminasi dengan falsafah lain yang bertentangan, maka para ilmuwan harus berusaha memahami secara menyeluruh dan utuh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran alam, dan kebenaran. kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, serta hubungan antara mereka dan kedudukannya. Inilah yang para guru perlu terus menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan menjadikan jalan hidup untuk internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam segenap kegiatan (Kaelan, 2014).

Nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu tersimpan dalam berbagai seni budaya yang merupakan situs kokoh tempat anak bangsa menggali berbagai macam nilai yang dijadikan landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan rumah saat ini tidak hanya menggali nilai-nilai luhur yang diwariskan tersebut akan tetapi terus mengembangkan menjadi bekal yang memadai untuk menyongsong sejarah yang terus berjalan menuju masa depan. Kecerdasan yang dilapisi berbagai keterampilan akan melahirkan ketangguhan manakala bersemayam dalam kepribadian yang senantiasa menegakkan kebaikan dalam perbuatan sehari-hari.

Komunikasi yang belakangan ini terasa sering mengalami distorsi secara sistematis perlu disadari sebagai penyimpangan atas komunikasi murni dalam taraf bahasa maupun tingkah laku (Hardiman, 2021). Tantangan para guru menggunakan berbagai strategi (apa yang dilakukan para pendahulu bangsa dapat dijadikan contoh) agar anak-anak mendapat landasan kokoh bagaimana mengatasi problematika yang semakin rumit. Para guru yang cerdas, terampil, berakhlak mulia akan menjadi benteng tangguh pembangunan generasi muda untuk menghadapi era digital yang makin canggih di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Salah satu pertanyaan penting pada saat seminar dilaksanakan adalah bagaimana mengembangkan budi pekerti luhur pada era digital dengan tantangan kemajuan teknologi komputasi yang memiliki dampak perubahan perilaku pada peserta didik. Kenyataan menunjukkan peserta didik membutuhkan ruang untuk bermain bersamaan dengan proses pembentukan karakter dalam sistem pembelajaran yang dilaksanakan. Sistem pembelajaran yang memperhatikan tidak hanya sisi indera dan logika tetapi sekaligus mengembangkan nurani, naluri, intuisi, dan imajinasi (Faiz, 2018) membutuhkan kesiapan para guru dalam membentuk niat yang dalam penelitian masuk ke ranah *civic will*.

Niat (*civic will*) yang menjadi kesadaran kokoh akan menjadi lahan subur pengetahuan (*knowledge*) dengan kekuatan keterampilan guru menggunakannya dalam proses pembelajaran. Kesadaran yang terbangun dalam kepribadian guru akan berinteraksi dengan kesadaran peserta didik pada atmosfer spiritual membangun berlangsungnya pendidikan yang holistik. Hal ini merupakan satu proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam lingkungan anak usia dini yang akan mempersembahkan sumber daya manusia berbudi pekerti luhur pendukung cita-cita Proklamasi 1945.

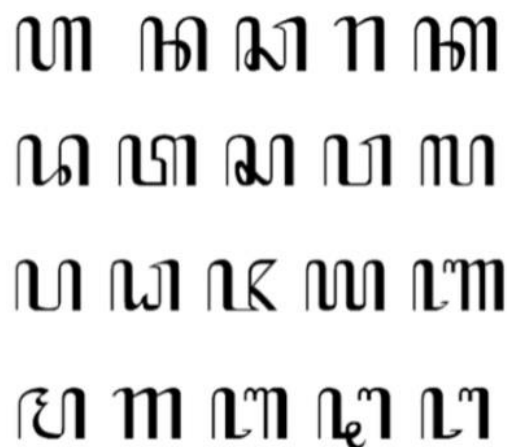
Wali sembilan (Sunan Kalijaga) meninggalkan ajaran luhur yang diwarisi hingga saat ini oleh bangsa Indonesia dalam berbagai nasehat penting untuk kehidupan melalui pengembangan budaya bangsa. Wayang kulit dan wayang golek sebagai pertunjukan

dengan konten Ramayana, Mahabarata, dan Baratayuda mengandung pesan tidak hanya religius tetapi juga sekaligus sakral (Faiz, 2017). Hasil diskusi menunjukkan bahwa Pancasila hanya dapat dijadikan kekuatan oleh masyarakat untuk mencapai kesaktian peradaban oleh pribadi-pribadi yang mencerminkan budi pekerti Pandhawa. Pribadi demikian tidak pernah menganggap saudara sebagai musuh apapun kesalahan yang telah dilakukan. Sebaliknya kepribadian Korawa digambarkan dalam Bharatayudha sebagai kelompok yang menganggap saudara sebagai musuh. Kepentingan politik membuat halal semua langkah. Bahkan jamus kalimasada yang sedemikian ampuh tidak akan berguna di pihak Korawa.

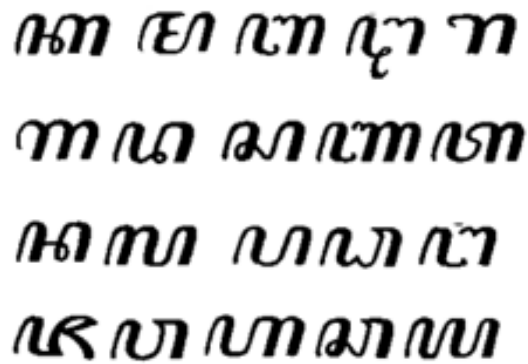
Kesadaran yang digambarkan Sunan Kalijaga dijemakan pada kepribadian Pandhawa dapat dikembangkan para guru mulai dari diri sendiri kemudian diinternalisasikan ke proses pembelajaran bersama para peserta didik. Pada proses pembelajaran para guru bisa mengembangkan potensi nurani, naluri, intuisi dan imajinasi peserta didik dengan media yang diwariskan oleh para pendahulu dengan berbagai strategi (rencana pembelajaran).

Kearifan lokal memiliki keunggulan yang dapat dibanggakan dalam berbagai macam catatan penelitian. Salah satu contoh adalah konstruksi yang dilakukan pendiri Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Alm. Prof. Damardjati Supadjar. Huruf Jawa yang semula dalam susunan *hana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga* berhasil direkonstruksi menjadi *kama batara gada sanyata nala padhanga jawa hacaya* (Supadjar, 2010). Konstruksi yang dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya tidak hanya menampilkan susunan huruf (bunyi) yang berbeda akan tetapi sekaligus memberikan kedalaman makna yang luar biasa.

Huruf yang pada masa sebelumnya dikenal dengan kisah selama berabad-abad ada dua orang utusan yang berujung wafat melaksanakan tugas berubah menjadi narasi yang menghasilkan ajaran dari nilai-nilai yang berhasil dikonstruksi. Susunan *kama batara gada sanyata nala padhanga jawa hacaya* (hasil konstruksi) menggambarkan bagaimana ajaran luhur memiliki satu kekuatan maha dahsyat yang memberikan pencerahan untuk mewujudkan negara adil makmur bagi semua.



Gambar 1. (huruf Jawa sebelum direkonstruksi)



Gambar 2. (huruf Jawa setelah direkonstruksi)

Perkembangan pemikiran filsafat dunia tidak boleh diabaikan oleh para peneliti filsafat Pancasila. Para guru bisa menjadikan pesan tersebut sebagai motivasi untuk berpartisipasi dalam pengembangan hermeneutika Pancasila. Kepribadian matang yang terus diasah dalam implementasi nilai-nilai luhur warisan bangsa akan menghasilkan kekuatan untuk senantiasa melakukan rekonstruksi (bisa dalam konteks menafsirkan kembali) nilai-nilai luhur dengan memperhatikan aktualisasi pada era yang sedang berjalan. Pada saat generasi muda mulai tertarik pada topik-topik filsafat dunia maka kalangan pendidik ada pada era menjawab tantangan bagaimana ideologi yang diwariskan oleh pendiri bangsa tetap bisa aktual dalam percaturan dunia.

Pewarisan nilai-nilai luhur dalam era digital membutuhkan pengetahuan sekaligus keterampilan yang tidak hanya bisa didapatkan dengan membaca akan tetapi perlu laku yang meningkatkan keterampilan dan pengembangan kepribadian (Wahyuni & Azwar, 2022) yang secara kolektif akan mewujudkan masyarakat madani sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI akan terus hidup dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara jika sistem pendidikan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai *ruh* yang terus ada di dalam setiap proses pembelajaran. Pendidikan yang demikian ini oleh para pendiri bangsa dicita-citakan sebagai pembangunan jiwa dan raga (pembangunan manusia Indonesia seutuhnya).

Webinar nasional pada tanggal 15 Oktober 2022 yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan Guru dan Madrasah Ibtidaiyah Universitas Negeri Sunan Ampel dalam rangka memperkuat implementasi nilai-nilai kebangsaan di sekolah dan madrasah memberikan kajian mendalam tentang filsafat Pancasila sebagai bekal guru dan calon guru untuk melaksanakan proses pembelajaran demi memantapkan kepribadian luhur pada anak-anak sekaligus guru. Salah satu contoh yang diangkat pada kegiatan tersebut adalah bagaimana demokrasi Pancasila dapat ditegakkan dengan kepribadian yang memiliki kebersihan hati. Kegiatan seperti ini tidak hanya penting dilaksanakan sebagai momen nasional akan tetapi sekaligus bisa dilaksanakan pada kelompok-kelompok kecil dalam rangka menguatkan nilai-nilai luhur yang sudah dipahami. Tradisi *tadarus*, *murottal*, dan sejenisnya bisa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan *civic skill* bagi siapa saja yang dilibatkan sekaligus menuju terbentuknya *akhlakul karimah* (Narmoatmojo et al., 2014).

Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur warisan pendahulu bangsa pada masa ini akan terus dipelihara sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pemahaman akan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan berbagai kelompok dalam berbagai kategori akan memperkaya pengembangan nilai-nilai luhur itu menjadi acuan dalam berbagai sikap tindak pergaulan sehari-hari dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Pelestarian nilai-nilai dengan strategi yang dinamis akan membuat nilai-nilai tersebut kekal dan terus berkembang mengiringi percepatan kemajuan digital yang terus mempengaruhi peradaban manusia.

Spiritualitas dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti luhur. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan salah satu dari empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan segenap penyelenggara negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (Latif, 2021b).

SIMPULAN DAN SARAN

Guru sebagai pelaksana dengan posisi garda terdepan wajib membangun kesadaran dalam dirinya untuk dibawa dalam proses pembelajaran sehingga internalisasi *akhlakul karimah* berada dalam kerangka Pendidikan holistik. Hal demikian akan terwujud dengan kokohnya nilai-nilai kebangsaan dalam segala sikap tindak para guru dengan segenap ketulusan mengabdikan demi pengembangan dunia pendidikan ke arah yang lebih baik berdasarkan Pancasila.

Pemerintah perlu mendorong para guru dan memfasilitasi tersedianya beasiswa untuk pelaksanaan penelitian pendidikan filsafat Pancasila terutama bagi para guru di kalangan pendidikan anak usia dini serta terus menerus naiknya capaian kompetensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai program yang bersinergi akan mempercepat kemampuan bangsa menyongsong berbagai kemajuan yang akan terus dicapai masyarakat dunia.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Kementerian Agama Republik Indonesia, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang dengan segala program dan fasilitas yang disediakan telah mendukung tersusunnya tulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Doherty, D., Bryan, A. C., Willis, R., & Witry, P. (2019). Representation Imperatives in the Public Mind. *Social Science Quarterly*, 100(6), 1964–1983. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12686>
- Faiz, F. (2017). *Ngaji Filsafat: Sufi Nusantara - Sunan Kalijaga*. Masjid Jenderal Sudirman. <https://www.youtube.com/watch?v=wCfNKC9y66A>
- Faiz, F. (2018). *Ngaji Filsafat: Rudolf Steiner - Waldorf Education*. Masjid Jenderal Sudirman. <https://www.youtube.com/watch?v=zJdC934ot94&t=961s>
- Hardiman, F. B. (2018). *Demokrasi dan Sentimentalis* (Widiantoro (ed.); 1 ed.). Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2019). *DEMOKRASI DELIBERATIF* (7 ed.). Kanisius.

- Hardiman, F. B. (2021). *Kritik Ideologi*. Kanisius.
- Hidayati, U. (2019). THE POLITICAL COMMUNICATION PROCESS AMONG CHINESE MOSLEM SOCIETY. *Informasi*, 49(2), 125-143. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1509403&val=477&title=The political communication process among Chinese moslem society](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1509403&val=477&title=The%20political%20communication%20process%20among%20Chinese%20moslem%20society)
- Irhas, I., Asrowi, A., & Diono, D. (2022). Digitalize Puppet Games as an Innovation for the Implementation of Character Education in Elementary: A Literature Overview. *International Journal of Instructional Technology and Educational Studies*, 3(3), 1-5. <https://doi.org/10.21608/ihites.2022.112816.1097>
- Ivinson, G. (2020). The power of living knowledge: re-imagining horizontal knowledge. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 48(1), 1-16. <https://doi.org/10.1080/1359866X.2019.1696453>
- Kaelan. (2014). *The Philosophy of Pancasila* (1 ed.). Paradigma Press.
- Laia, A., & Hulu, F. (2022). ANALISIS SIKAP TOLERANSI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN GOTONG ROYONG DI DESA HILIZAMURUGO KECAMATAN SUSUA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021. *CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION*, 3(1), 1-11. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPKn/article/view/487/428>
- Latif, Y. (2015). *Revolusi Pancasila* (1 ed.). Mizan.
- Latif, Y. (2021a). *Mata Air Keteladanan* (6 ed.). Mizan.
- Latif, Y. (2021b). *Negara Paripurna* (8 ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Liem, A. (2018). Interview schedule development for a Sequential explanatory mixed method design: complementary-alternative medicine (CAM) study among Indonesian psychologists. *International Journal of Social Research Methodology*, 21(4), 1-13. <https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1434864>
- Mavilidi, M. F., Rigoutsos, S., & Venetsanou, F. (2022). Training Early Childhood Educators to Promote Children's Physical Activity. *Early Childhood Education Journal*, 1(1), 785-794. <https://doi.org/10.1007/s10643-021-01191-4>
- Mukaffa, Z. (2018). *Guru Sufi* (H. Mustofa & Muntaha (ed.); 1 ed.). UIN Sunan Ampel Press.
- Narmoatmojo, W., Hartanto, R. V. P., & Kokotiasa, W. (2014). *Pancasila dan UUD NRI 1945* (1 ed.). Ombak.
- PITTY, R. (2022). The historic failure of the EU and nationalism in the Covid 19 pandemic. *Australian and New Zealand Journal of European Studies*, 14(2), 4-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.30722/anzjes.vol14.iss2.16167>
- Pring, R. (2021). Faith, reason and religious education: an essay for teachers of religions in a sceptical age. *International Studies in Catholic Education*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/19422539.2021.1942684>
- Rianawaty, I., Suyata, Dwiningrum, S. I. A., & Yanto, B. E. (2021). Model of Holistic Education-Based Boarding School: A Case Study at Senior High School. *European Journal of Educational Research*, 10(2), 567-580. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1294511.pdf>
- Romero-Tena, R., Barragán-Sánchez, R., Llorente-Cejudo, C., & Palacios-Rodríguez, A. (2020). The challenge of initial training for early childhood teachers. A cross sectional study of their digital competences. *Sustainability*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.3390/su12114782>
- Schleicher, A. (2018). Educating Learners for Their Future, Not Our Past. *ECNU Review of Education*, 1(1), 58-75. <https://doi.org/10.30926/ecnuoe2018010104>
- Suherman, A., & Nugraha, H. S. (2019). NILAI- NILAI KEBANGSAAN DALAM LIRIK

- PUPUH UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR. *Jaladri*, 5(1), 1-9.
<http://jurnal.upmk.ac.id/index.php/jaladri/article/view/1467/711>
- Supadjar, D. (2010). *Renaissance Budaya Nusantara* 1. 56:52.
<https://www.youtube.com/watch?v=v3pz09zpgzU>
- Susanto, A. F., Rahayu, Mella, Ismelina, F., Septianita, H., Tejabuana, R., & Sukma, L. (2020). *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal* (1 ed.). LoGoz Publishing.
- Susilawati, S., Aprilianti, D., & Asbari, M. (2022). The Role of Islamic Religious Education in Forming the Religious Character of Students. *Journal of Information Systems and Management*, 1(2), 1-5. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/1/1>
- Sutarto, D. (2019). IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI SEBAGAI SOLUSI BAGI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL. *Petita*, 1(1), 75-86.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2585636&val=24314&title=IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI SEBAGAI SOLUSI BAGI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2585636&val=24314&title=IMPLEMENTASI%20NILAI%20DEMOKRASI%20SEBAGAI%20SOLUSI%20BAGI%20PENGENTASAN%20KEMISKINAN%20DAN%20KESENJANGAN%20SOSIAL)
- Tryfon, M., Anastasia, A., & Eleni, R. (2021). Parental perspectives on inclusive education for children with intellectual disabilities in Greece. *International Journal of Developmental Disabilities*, 67(6), 1-9.
<https://doi.org/10.1080/20473869.2019.1675429>
- Wahyuni, I. W., & Azwar, S. (2022). Fostering Tolerance in Early Childhood in Islamic Perspectives and Social Learning Theory. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 4(1), 1-24. <https://doi.org/10.15642/jeced.v4i1.1676>
- Yaacob, A., Asraf, R. M., Hussain, R. M. R., & Ismail, S. N. (2021). Empowering Learners' Reflective Thinking through Collaborative Reflective Learning. *International Journal of Instruction*, 14(1), 710-726. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14143a>

AUTHOR



Dr. Subelo Wiyono, S.H., M.Pd., dilahirkan di Lamongan 19 Maret 1972, ia menempuh pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada Jurusan Ilmu Hukum, kemudian pendidikan S-2 di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan menyelesaikan S-3 dengan bea siswa LPDP pada Fakultas PIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Sejak tahun 2012, ia menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) Universitas Pasundan dan mengampu mata kuliah Pancasila, saat ini di Fakultas Hukum Universitas Pasundan menjadi dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor. Selain menjadi dosen ia aktif berceramah dan berkhotbah, baik dalam kegiatan keagamaan maupun peringatan hari-hari besar nasional. Selain menjadi pendidik dan penulis artikel, pernah mendapat tugas sebagai Ketua Pusat Pengembangan Ilmu Hukum, Ketua Unit Penjaminan Mutu dan Wakil Ketua Lembaga Pengaduan dan Bimbingan Konsultasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Anggota Perguruan Pencak Silat Bela Diri Tangan Kosong (PPS betako) Merpati Putih ini juga aktif di LPBH PWNU Jawa Barat. Kontak *e-mail*: subelo.wiyono@unpas.ac.id



Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H., dilahirkan di Indramayu, 04 Maret 1970, ia menempuh pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada Jurusan Ilmu Hukum, kemudian pendidikan S-2 di Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan dan menyelesaikan S-3 di Universitas Pasundan. Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Pasundan untuk program Sarjana dan Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Hukum. Selain menjadi dosen, ia aktif sebagai Advokat dan berperan dalam memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam beberapa perkara Perdata di Pengadilan Purwakarta dan Karawang mengenai Bidang Pertanahan. Selain menjadi pendidik, penulis buku, dan

penulis artikel, saat ini sedang menjabat sebagai Koordinator Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Sekretaris Bidang Politik dan Hukum Paguyuban Pasundan. Ketua Biro Hukum Paguyuban Pasundan, Sekjen LPBH NU Jawa barat, dan Wakil Ketua AAI *Officium Nobile* Cabang Bandung.



Yudi Prihartanto Soleh, S.H., M.Hum., Lahir di Bandung Tanggal 06 Juni 1971, Lulus Sekolah Menengah Atas Negeri Sidareja, Cilacap, Lulus Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Pasca Sarjana (S2) Universitas Parahyangan Bandung, Advokat dan Penasehat Hukum sejak Tahun 1998, Sebagai Dosen Tetap Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Agraria dan Hukum Perusahaan, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PWNU Jabar, Anggota Lembaga Biro Bantuan Hukum PGRI Jawa Barat.



Rusli Subrata, S.H., M.H., Lahir di Bandung Tanggal 30 juli 1972, Lulus sekolah Menengah Atas Sumatra 40, Lulus Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Pasca Sarjana (S2) Universitas Pasundan Bandung, Advokat dan Penasehat Hukum sejak Tahun 2000, Sebagai Dosen Tetap Hukum Acara Perdata dan Sekertaris Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Anggota Lembaga Biro Bantuan Hukum PGRI Jawa Barat, Sekertaris Biro Bantuan dan Konsultasi Paguyuban Pasundan,